



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 159 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN NGULING  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Nguling sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 );
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Nguling yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Nguling adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nguling untuk periode 1 ( satu ) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Nguling yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Nguling adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Nguling serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

Renja Kecamatan Nguling Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.

#### Pasal 3

Renja Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Nguling dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Nguling tahun lalu.

#### Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Nguling Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN,
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kecamatan Nguling Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Nguling Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Nguling dalam menyusun RKA Kecamatan Nguling .

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal **2 Agustus 2023**

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal **2 Agustus 2023**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 159

**RENCANA KERJA  
( RENJA )**

**TAHUN 2024**



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN NGULING  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan nikmat-Nya syukur Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA ) Kecamatan Nguling Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Nguling ini disusun berdasarkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Nguling maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban, penyusunan Renja Perubahan juga dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi rencana strategis serta arah kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Nguling dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan kerja.

Disamping itu, meskipun Rencana Kerja Perubahan ini jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban strategis pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban evaluasi rencana kerjaPerubahan Kecamatan. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana strategis, rencana anggaran dan laporan akuntabilitas di masa mendatang.

Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Pemerintah Daerah Kecamatan Nguling, serta berguna bagi semua pihak.

Nguling, Mei 2023

CAMAT NGULING

ttd.

**MULYOHADI,SH.MM**

Pembina

Nip.196904111992021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Renja Kecamatan Nguling adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nguling untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Renja Awal Kecamatan Nguling merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Nguling yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Nguling mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Awal Kecamatan Nguling dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Nguling, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Nguling tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Nguling.

Penyusunan Renja Kecamatan Nguling yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup Tahap perumusan rancangan Renja Awal Kecamatan Nguling, perumusan rancangan Renja Kecamatan dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Nguling;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Nguling tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan ;

Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Nguling tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Nguling ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Nguling dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Nguling, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Nguling tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Nguling (kalau sudah tersedia), dan

perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Kerja OPD Kecamatan Nguling disusun atas dasar :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Genjer dalam Pembangunan Nasional.
3. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah enjadi Undang-undang;
8. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang RPJPD Nasional tahun 2005 -2025;
10. Undang - Undang Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
18. Permendagri No.67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Genjer Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana erja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Pernencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3,Level 2,

Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Bali dan Jawa;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( yang dikeluarkan setiap tahunnya pada bulan Juni )
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Ferifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur tentang :
  - A. Tata cara Klasifikasi ,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi ,dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perncanaa Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.906/2114/SJ Tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klarifikasi,Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2022,DBHCHT TA 2022,Usulan Kemendikbudrisktek dan Kemenkes
28. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023.
31. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014.
32. Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 tahun 2016

tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;

35. Peraturan Pasuruan Nomor .....tentang RPD Kabupaten Pasuruan ( Menyusul )
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomer 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.1 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan gender
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
40. Peraturan Bupati SOTK Kecamatan Nomor 69 Tahun 2019 Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas ,serta Tata Kerja Kecamatan;
41. Peraturan Bupati Perubahan Renstra Kecamatan Nomor 36 Tahun 2022
42. Peraturan Bupati No.111 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Awal Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja Kecamatan Nguling adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Nguling dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Kabupaten Pasuruan yang lebih baik lagi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Nguling adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Nguling disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja Kecamatan Nguling disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Nguling.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja OPD Kecamatan Nguling disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 dengan outline sebagai berikut:

##### **BABI : Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

##### **BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

##### **BAB V: Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN NGULING TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Nguling.**

Rencana Kerja Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Nguling. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Nguling melalui tabel 2.1 ( T-C.29 ) dan tabel 2.1 A ; sbb:

Selain tabel 2.1 ( TC - 29 ) dan tabel 2.1 A capaian kinerja Kecamatan Nguling sejak periode tahun 2019 - 2022 Kecamatan Nguling juga bisa ditinjau dari segi program,kegiatan, dan sub kegiatan sudah bisa mencapai target yang kita rencanakan.Hanya saja kalau sudah kita implementasikan dengan anggaran ataupun pagu yang sudah ada di Kecamatan Nguling mengalami penurunan di beberapa kegiatan pada program - program tertentu dikarenakan adanya refofusing yang diakibatkan adanya wabah COVID- 19 .Dimana wabah ini sifatnya mendunia bukan hanya di Kabupaten Pasuruan sehingga mau tidak mau suka tidak suka kita harus dapat mensikapi dengan positif , karena dengan wabah ini anggaran yang semestinya untuk operasional Kantor dialihkan pada kegiatan wabah COVID-19 yang melalui refofusing yang saya sebutkan di depan.

Sejak adanya wabah COVID-19 tersebut anggaran di Kecamatan mengalami penurunan drastis dan menuntut kita untuk berupaya semaksimal mungkin agar supaya kegiatan yang sudah kita rencanakan tetap berjalan sesuai rencana dengan dana yang minim.Dan alhamdulillah berkat dukungan serta kerjasama antara stakeholder, Karyawan , serta masyarakat sekitar semua berjalan sesuai dengan apa

yang sudah kita rencanakan mesti belum sepenuhnya mencapai target yakni 100% tetapi ini semua tidak menjadikan Kecamatan Nguling menjadi pesimis justru dengan didapatkan ada target yang tidak sampai target menjadikan Kecamatan Nguling ke depan untuk bisa mengevaluasi dari ketidakberhasilan ini untuk menjadi lebih baik lagi di tahun selanjutnya.

**TABEL T-C.2.9 (Tabel 2.1)**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2023**  
**KABUPATEN PASURUAN**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Nguling

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan				RENJA 2022	LKPJ/LKIP				
	Bidang Urusan									
	<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>(Output) Tersedianya Fasilitas Perkantoran</b>	<b>0,00</b>	<b>472.907.882</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbnyarnya Rekening, Air, Listrik & Telepon	0,00	25.874.251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	0,00	41.280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pegawai Yang Melaksanakan Kebersihan	0,00	36.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor ( ATK )	0,00	10.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan	0,00	10.079.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Untuk Penerangan	0,00	2.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya AC,Printer dan lain-lain	0,00	3.920.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga	0,00	2.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Penyediaan Mekanisme dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	0,00	35.280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Perjalanan Luar Daerah	0,00	18.913.981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa Perkantoran	0,00	255.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan Pakian Kerja	Tersedianya Pakian Kerja	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan	0,00	30.180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>(Output) Persentase terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>0,00</b>	<b>89.377.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0,00	20.625.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Belanja Pengadaan Mebelair	0,00	29.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	0,00	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	0,00	32.102.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	0,00	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	(Outcome) Persentase terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelayanan Kecamatan	0,00	24.390.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Tersedianya Koordinasi & Pembinaan Pemerintahan Desa	0,00	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fasilitasi & Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Tersedianya Fasilitasi & Koordinasi Tingkat Kecamatan	0,00	14.390.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN</b>	(Outcome) Persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	40.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terfasilitasi Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	0,00	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	0,00	6.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Tersedianya Kegiatan Sosial Masyarakat	0,00	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	(Outcome) Persentase terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Tersedianya Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA</b>	(Outcome) Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	3.343.097.906	3.257.821.140	3.128.199.227	3.037.175.257	0,97	3.343.097.906	9.616.104.002
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5.926.000	1800000,00	6.310.000	5.926.000	93,91	5.926.000	13.152.000
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Data Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5.926.000	1.300.000	6.310.000	5.926.000	93,91	5.926.000	13.152.000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Keuangan Kecamatan yang dipenuhi	3.143.140.496	2.995.962.000	2.949.397.976	2.861.021.892	97,00	3.143.140.496	9.000.124.388
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.772.682.000	2.627.682.000	2.575.715.000	2.488.631.396	96,82	2.772.682.000	7.888.995.396
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	382.478.496	322.800.000	332.767.976	331.910.496	99,74	382.478.496	987.188.992
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Data Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.980.000	45.480.000	40.915.000	40.480.000	98,94	37.980.000	123.940.000
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Pengadaan Pakaihan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaihan Kerja	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)		
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Umum yang dipenuhi	93.120.000	79.614.690	84.008.370	83.855.964	99,82	93.120.000	266.590.654	2,76
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.568.000	3.160.000	2.309.800	2.309.800	100,00	5.568.000	11.087.800	1,98
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14.388.000	8.806.000	10.506.100	10.506.000	100,00	14.388.000	33.700.000	2,34
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.862.000	1.890.230	3.791.910	3.694.250	97,42	6.862.000	12.446.480	1,81
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9.426.000	3.380.300	5.022.400	4.988.000	99,32	9.426.000	17.794.300	1,89
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.876.000	62.378.160	62.378.160	62.367.914	99,97	56.876.000	181.612.074	3,19
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Kecamatan yang dilaksanakan	22.547.460	71.283.630	4.300.000	4.300.000	100,00	22.547.460	98.131.090	4,35
	1	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.893.770	16.016.000	3.300.000	3.300.000	100,00	2.893.770	22.909.770	7,68
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19.653.690	55.267.630	1.000.000	1.000.000	100,00	19.653.690	75.921.320	3,88
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	23.129.990	20.917.300	28.747.451	26.775.311	93,14	23.129.990	70.822.601	3,06
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	23.129.990	20.917.300	28.747.451	26.775.311	93,14	23.129.990	70.822.601	3,06
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintahan	55.233.659	68.753.520	55.396.430	55.296.090	99,82	55.233.659	179.283.269	3,25
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38.342.659	30.432.434	37.672.090	37.646.090	99,93	38.342.659	106.421.183	2,78
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.320.000	2.883.325	8.049.600	8.000.000	99,36	6.320.000	17.003.325	2,69
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.571.000	35.637.761	9.674.740	9.650.000	99,74	10.571.000	55.858.761	5,28
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>(Outcome) Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>	<b>46.287.900</b>	<b>18.897.700</b>	<b>36.702.700</b>	<b>34.935.000</b>	<b>95,18</b>	<b>46.287.900</b>	<b>100.120.600</b>	<b>2,16</b>
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.287.900	18.897.700	36.702.700	34.935.000	95,18	46.287.900	100.120.600	2,16
	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	46.287.900	18.897.700	36.702.700	34.935.000	95,18	46.287.900	100.120.600	2,16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)		
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	(Outcome) Peningkatan Desa/ Kelurahan yang terbina dengan baik	27.115.650	1.396.800	10.666.000	10.716.500	100,57	27.115.650	39.228.950	1,45	
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	27.115.650	1.396.800	10.666.000	10.716.500	100,57	27.115.650	39.228.950	1,45
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.115.650	1.396.800	10.666.000	10.716.500	100,57	27.115.650	39.228.950	1,45
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	5.940.000	43.048.650	7.533.600	7.530.000	99,95	5.940.000	0,00	0,00	
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.940.000	43.048.650	7.533.600	7.530.000	99,95	5.940.000	0,00	0,00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Kecamatan	0,00	25.338.200	0	0	99,95	0,00	25.338.200	0,00
	1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.940.000	17.710.450	7.533.600	7.530.000	99,95	5.940.000	0,00	0,00
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	(outcome) Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas	1.665.000	72.978.280	4.950.000	4.950.000	100,00	1.665.000	79.598.280	47,80	
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.665.000	72.978.280	4.950.000	4.950.000	100,00	1.665.000	79.598.280	47,80
	1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.665.000	1.980.000	2.475.000	2.475.000	100,00	1.665.000	6.120.000	3,68
	2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	70.998.280	2.475.000	2.475.000	100,00	0,00	73.478.280	0,00
TOTAL			3.424.106.155	4.000.428.252	3.188.002.527	3.095.306.757	97,09	3.424.106.155	9.837.046.832	2,87	

Nguling, Januari 2023  
Camat Nguling

**MULYOHADI, S.H., M.M.**  
Pembina  
Nip.196904111992021001

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nguling Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

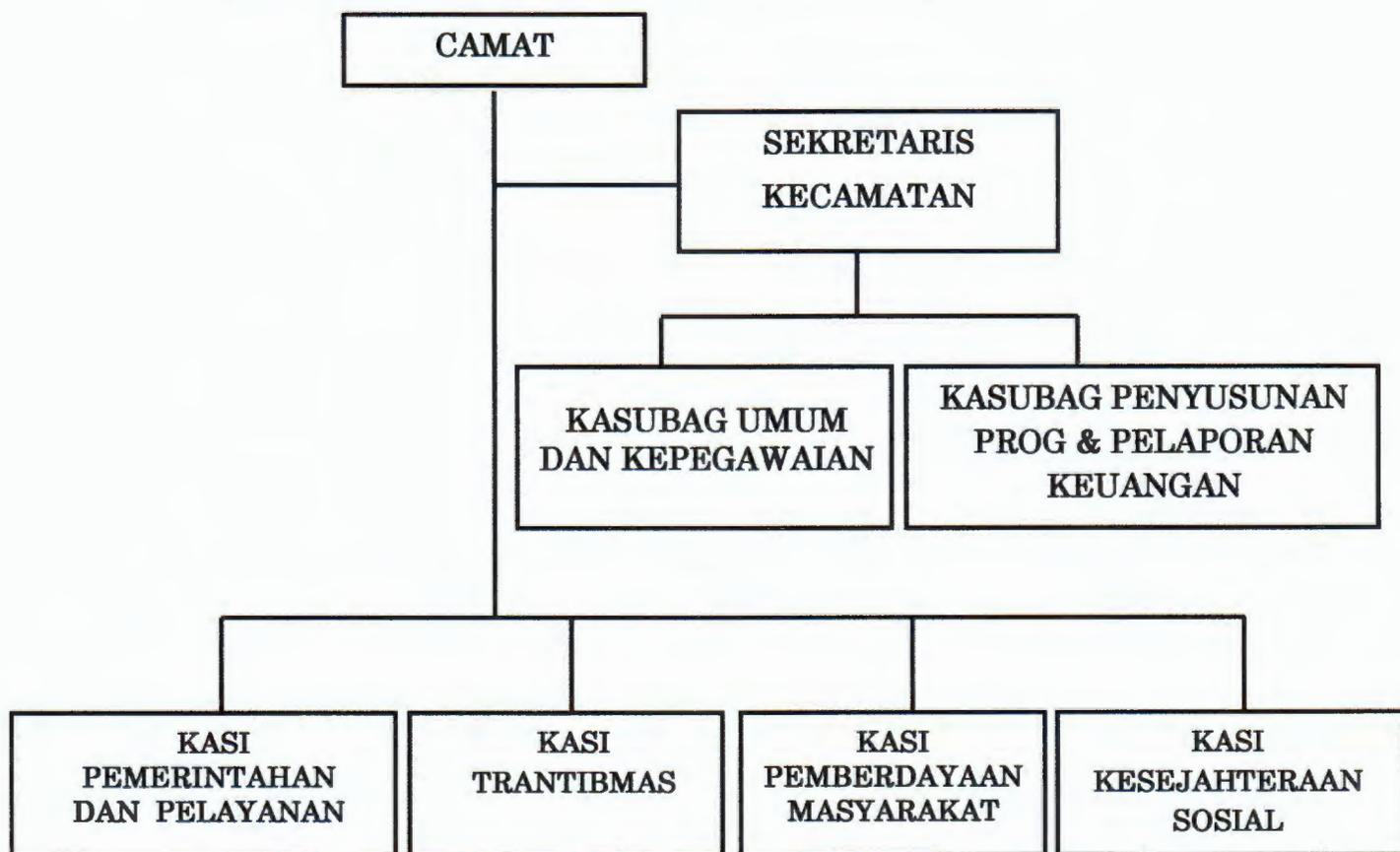
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung Kepala Daerah atau Bupati :

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris yang terdiri :
  - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - b. Kasubag Pelaporan dan Perencanaan Keuangan
3. Unsur pelaksana yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
  - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kecamatan Nguling.

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGULING

( Berdasarkan Perbup Nomor 69 Tahun 2016 )



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Nguling akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nguling dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Nguling meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

#### 1. Lingkungan Internal

##### **Kekuatan :**

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

### **Kelemahan**

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib serta lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

## 2. Lingkungan Eksternal

### **Peluang**

- RPJMD Kabupaten Pasuruan 2005 – 2025 Tahap kedua (2010 – 2015)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan
- Dukungan serta partisipasi masyarakat luas
- Pengadaan Diklat / bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas aparatur terkait Tupoksi
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

### **Ancaman :**

- Masih rendah dan kurang memadai sarana dan prasarana di wilayah
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 ( TC-30 ).

Dari tabel 2.2 ( TC-30 ) bisa kita simpulkan bahwasanya Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguling selalu mengalami kemajuan mesti belum bisa dikatakan maksimal tetapi setidaknya antara target dengan realisasi tidak jauh - jauh .Artinya dari target selalu terrealisasi 100% bahkan ada juga yang melenihi dari

target yang kita rencanakan. Harapan kami tahun berikutnya bisa jauh lebih baik dari tahun sebelumnya mengingat wabah COVID - 19 bisa dibilang sudah tidak ada. Dengan tidak adanya wabah COVID -19 besar kemungkinan tidak akan ada pengurangan anggaran lagi yang berakibat positif baik dari segi anggaran. Ataupun untuk kegiatan sehingga akan menjadikan Kecamatan Nguling jauh lebih maju dari sebelumnya itu harapan kami nantinya.

TC-30 (Tabel 2.2 )

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nguling  
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	<b>IKU (Tujuan &amp; Sasaran) P-Renstra 2018-2023</b>											
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan			75,15	76	76,5	77	75,39				
2	Presentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas			85	90			87,93				
3	Presentase Desa / Kelurahan yang Telah Dibina			100	100			100%				
4	Persentase Konflik yang Tertangani di Wilayah Kecamatan			100	100			100%				
II	<b>IKU (Tujuan &amp; Sasaran) Renstra 2024-2026</b>											
1	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.					80,5	83			80,5	83	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.					76,5	77			76,5	77	

Nguling, Januari 2023  
Camat Nguling

ttd.

**MULYOHADI,SH.MM**

Pembina  
Nip. 196904111992021001

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Isu-isu strategis pembangunan Pasuruan yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Nguling dapat dikategorikan dalam uraian- uraian dibawah ini :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
- 2) Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, dan akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan yang pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang seimbang ;
- 4) Pembinaan kewilayahan, yakni arah pengembangan diarahkan sesuai dengan pola pengembangan.
- 5) Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai SKPD yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa setempat.

Pada tanggal 14 Januari 2023, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa yakni Surat Mendagri Nomor 100.3.5.5/244/SJ hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Adapun yang menjadi dasar dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ yaitu pelaksanaan pemilihan kepala Desa pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dan menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya yang mengatur masa kampanye Pemilu dan Pilkada Serentak sehingga diperlukan dukungan situasi yang kondusif.

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala Desa pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dan menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya yang mengatur masa kampanye Pemilu dan Pilkada Serentak diperlukan dukungan situasi yang kondusif, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa acara "Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang acara . Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa acara "Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota acara.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau

- c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
4. Dengan memperhatikan pertimbangan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka:
    - a. Bupati/Wali Kota dapat melaksanakan kembali pemilihan kepala desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Bupati/Wali Kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa sebelum tanggal 1 November 2023 dan yang akan menunda sampai dengan selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 agar melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
    - c. Dalam rangka pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar melakukan koordinasi dengan FORKOPIMDA khususnya dalam menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayah Saudara/i.
    - d. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayahnya masing-masing serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagaimana kita yang ada di lingkungan Kecamatan tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh tingkat pusat banyak sekali yang harus dipersiapkan tentunya juga tidak lepas dari kerjasama serta koordinasi dengan FORKOPIMCA khususnya untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Nguling. Apalagi boleh dibilang Kecamatan Nguling dominan warga Pantura dengan SDM yang tidak begitu memadai sehingga masih mudah dipengaruhi oleh para pelopor - pelopor CALEG yang membawa dampak negatif dalam arti memilih bukan dari hati dan cara pandang pribadi melainkan masih ada pengaruh dari luar, kita sebagai ASN yang

berakhlak harus bisa memberi contoh yang positif baik dari sikap ataupun tutur kata.

Sedangkan harapan kita setelah pelaksanaan CALEG nantinya kita mendapatkan pemimpin yang bisa menginspirasi suara rakyat bukan hanya mementingkan kepentingan partai atau yang lainnya. Sehingga Kecamatan sebagai unsur pemerintahan yang paling bawah yang punya peranan memberikan evaluasi pada calon PILKADES khususnya ,agar supaya benar - benar terjaring calon yang sifatnya menjadi pemimpin yang amanah serta tanggung jawab.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja OPD**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada OPD. Sedangkan OPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kecamatan Nguling dari tahun ke tahun perkembangan yang bisa kita simpulkan terkait program kegiatan dan sub kegiatan alhamdulillah antara target dan realisasi sudah terpenuhi semua .Mesti pada kenyataannya anggaran di Kecamatan sangat minim tapi kita berupaya untuk bisa meminimalisir penggunaan sesuai kondisi anggaran yang ada.Ini bisa dilihat pada tabel TC.31 sebagaimana terlampir.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nguling Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nguling saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan OPD Kecamatan Nguling mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Nguling dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. Ini bisa dilihat pada tabel TC.32 sebagaimana terlampir.

**TC- 32 ( Tabel 2.4 )**  
**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Kabupaten Pasuruan**

**Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN NGULING**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>N I H I L</b>				

Nguling, 2023  
CAMAT NGULING

ttd.

**MULYOHADI,SH.MM**  
Pembina  
Nip.196904111992021001

**Tabel 3.2**  
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
<b>IKU (Tujuan &amp; Sasaran) Renstra 2018-2023</b>				
<b>Tujuan :</b>				
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	89,23	90	
<b>Sasaran :</b>				
1. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	75,39	76	
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	87,93%	90%	
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Presentase Desa / Kelurahan yang Telah Dibina	100%	100%	
4. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang Tertangani di Wilayah Kecamatan	100%	100%	
<b>IKU (Tujuan &amp; Sasaran) Renstra 2024-2026</b>				
<b>Tujuan :</b>				
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )			90,5
<b>Sasaran :</b>				
1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan			82,5
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan			76,5

Nguling, 2023  
CAMAT NGULING

MULYOHADI,SH.MM  
Pembina

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Nguling telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik
2. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
3. Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.
4. Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
5. Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
6. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategik ini, maka Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga memungkinkan Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Masyarakat lebih sejahtera ;
- b. Lebih mandiri ;
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global ;
- d. Memiliki integritas moral, etik, spiritual baik individu maupun sosial ;  
dan
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai – nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran strategik Kecamatan Nguling merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PROGRAM</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Efektifitas dan Optimalisasi Anggaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

Tabel T.C.31 ( Tabel 2.3 )  
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan Nguling

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	<b>PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Nguling	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintahan	100%	9.159.682.180	<b>PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Nguling	Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	9.159.682.180	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Nguling	Tercapainya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	59.000.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Nguling	Tercapainya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	59.000.000	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15.000.000	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15.000.000	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	30.000.000	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	30.000.000	
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	14.000.000	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	14.000.000	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Nguling	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.032.217.160	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Nguling	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.032.217.160	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nguling	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	7.195.603.800	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nguling	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	7.195.603.800	
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	726.726.000	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	726.726.000	
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	109.887.360	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	109.887.360	
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Nguling	Persentase pemenuhan adm BMD	100%	2.427.400	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Nguling	Persentase pemenuhan adm BMD	100%	2.427.400	
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	1.000.000,00	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	1.000.000,00	
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	1.427.400,00	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	1.427.400,00	
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Nguling	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	72.000.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Nguling	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	72.000.000	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	12.000.000	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	12.000.000	
	2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	5.000.000	2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	5.000.000	
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Nguling	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	35.000.000	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Nguling	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	35.000.000	
	4 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Nguling	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	20.000.000	4 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Nguling	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	20.000.000	
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Nguling	Jumlah layanan administrasi Umum yang diponahi	100%	445.921.600	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Nguling	Jumlah layanan administrasi Umum yang diponahi	100%	445.921.600	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15.000.000	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15.000.000	

No	Rancangan Awal RRPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.000.000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	10.000.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	10.000.000	
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20.000.000	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	35.000.000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	35.000.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	20.000.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	20.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5.000.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5.000.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Nguling	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	310.921.600	8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Nguling	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	310.921.600	
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Nguling</b>	<b>Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Kecamatan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>170.000.000</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Nguling</b>	<b>Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Kecamatan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>170.000.000</b>	
1	Pengadaan Meubelair	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	70.000.000	1	Pengadaan Meubelair	Kecamatan Nguling	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	70.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Nguling	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	85.000.000	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Nguling	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	85.000.000	
3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Nguling	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.000.000	3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.000.000	
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Nguling</b>	<b>Jumlah Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>101.116.020</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Nguling</b>	<b>Jumlah Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>101.116.020</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	12 Laporan	63.116.020	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Nguling	Jumlah Pemabayaran Tagihan Rekening Air, Listrik dan Air	12 Laporan	63.116.020	
2	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Nguling	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	3.000.000	2	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Nguling	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	3.000.000	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Nguling	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Laporan	35.000.000	3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Nguling	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Laporan	35.000.000	
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Nguling</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>277.000.000</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Nguling</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>277.000.000</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Nguling	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	20 unit	150.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Nguling	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	20 unit	150.000.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Nguling	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	37.000.000	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Nguling	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor yang dipelihara	9 unit	37.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Nguling	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Lokasi	45.000.000,00	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Nguling	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Lokasi	40.000.000	
4	Pemeliharaan Mebelair	Kecamatan Nguling	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	5.000.000,00	4	Pemeliharaan Mebelair	Kecamatan Nguling	Jumlah Mebelair yang dipelihara	3 Unit	5.000.000,00	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Nguling	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Lokasi	40.000.000,00	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Nguling	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Lokasi	45.000.000,00	
II	<b>PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Nguling	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>429.720.000</b>	<b>PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Nguling	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>429.720.000</b>		
1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Nguling	<b>Jumlah terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>159.720.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Nguling	<b>Jumlah terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>159.720.000</b>		
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	59.720.000	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	6 Laporan	59.720.000	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	100.000.000	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	100.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Kecamatan Nguling	<b>Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Kecamatan Nguling	<b>Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>		
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Kecamatan Nguling	Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan	14 Layanan	250.000.000	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Kecamatan Nguling	Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan	14 Layanan	250.000.000	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Nguling	<b>Persentase Realisasi PBB-P2</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Nguling	<b>Persentase Realisasi PBB-P2</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>		
1	Flaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	20.000.000	1	Flaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	20.000.000	
III	<b>PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Nguling	<b>Persentase Usaha Kelompok Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>265.955.000</b>	<b>PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Nguling	<b>Persentase Desa/ Kelurahan yang terbina dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>265.955.000</b>		
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Nguling	<b>Jumlah Koord. Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>265.955.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Nguling	<b>Jumlah terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>100%</b>	<b>265.955.000</b>		
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	15.955.000	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	15.955.000	
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wil Kerja Kec	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	250.000.000	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wil Kerja Kec	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	250.000.000	
IV	<b>PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Nguling	<b>Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>	<b>PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Nguling	<b>Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>		
1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Nguling	<b>Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Nguling	<b>Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pega Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	120.000.000	1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	120.000.000	
	2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	15.000.000	2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguling	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	15.000.000	
V	<b>PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Nguling	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Nguling	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>			
I	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Kecamatan Nguling	<b>Jumlah terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Nguling	<b>Jumlah terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>		
	1	Fasilitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	1	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kepala Desa	Dokumen	-	
	2	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	25.000.000	2	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	25.000.000	
	3	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	15.000.000	3	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Nguling	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	15.000.000	
	4	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Nguling	Jumlah laporan pemantauan keamanan lingkungan pelaksanaan Pilkades	4 Laporan	20.000.000	4	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Nguling	Jumlah laporan pemantauan koamanan lingkungan pelaksanaan Pilkades	4 Laporan	20.000.000	
<b>TOTAL</b>						<b>10.050.357.180</b>					<b>10.050.357.180</b>		

### **3.3. Program Dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Yang berpedoman pada tahun sebelumnya maka program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Kegiatan :

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koord. dan Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan**
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
  - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Pengadaan Barang Cetak dan Mesin Lainnya
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - Pengadaan Meubelair
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Meubelair
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

- **Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
  - Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
  - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan
- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

### **3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

#### **➤ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan

### **4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

#### **➤ Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

### **5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

#### **➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa**

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil rekapitulasi pada tahun 2024 ini Kecamatan Nguling antara Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Program yang diambil Kecamatan Nguling Tahun 2024 ada 5 Program ;
2. Jumlah Kegiatan dari 5 program yang dipakai tepat 14 Kegiatan ;
3. Jumlah Sub Kegiatan terdiri atas 40 yang diambil dari 14 Kegiatan.

Dari hasil rekapitulasi di atas kami juga melakukan penyebaran lokasi juga kegiatan dimaksudkan agar supaya apa yang kita rencanakan akan terlaksana sesuai dengan harapan dan keinginan OPD juga target. Pada tahun ini kita lebih memilih pada lokasi wilayah yang kita anggap lebih membutuhkan pendekatan khusus baik ditinjau dari segi fisik ataupun lainnya.

Adapun implementasi Rencana Program / kegiatan tahun anggaran 2023 sebagaimana ada perubahan pada tabel 3.1 menjadi Kepmen 050-5889 Tahun 2021. sebagaimana terlampir

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT**  
**DAERAH**

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Kecamatan Nguling Tahun 2024, dan perkiraan maju Tahun 2025 sebagaimana terlampir. Dalam hal ini kami tetap mengacu pada 5 program tahunan yang sudah ditetapkan oleh Bupati, yang mana untuk tahun 2023 menitikberatkan pada **Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**.

Artinya di tahun 2024 nanti kita berupaya dan berusaha untuk lebih meningkatkan pada kegiatan yang sifatnya bisa menjadikan Masyarakat sekitar lebih kreatif dan berdaya saing. Tentunya ini juga tidak lepas dari bimbingan dan dukugan dari stakeholder beserta instansi terkaid. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan kita maka dengan sendirinya Kecamatan Nguling akan menjadi jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Adapun Program yang kami pilih diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Dalam program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdapat beberapa sub kegiatan yang lebih ditingkatkan seperti prosedur pelayanan dan sarana prasarana sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. Sedang pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan kita berharap nantinya kelompok UKM; BUNDESMAS; PKK, dan STUNTING. Melalui kegiatan Musrenbang bisa mengusulkan semacam pelatihan atau seminar untuk menambah wawasan yang sifatnya bisa meningkatkan daya pikir masyarakat untuk menjadi lebih berwawasan luas serta SDM yang tinggi pula. Dengan secara otomatis akan bisa meningkatkan nilai ekonomi warga setempat.

**Tabel 4(T-C.33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Pasuruan**

**NAMA OPD : KECAMATAN NGULING**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokal	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>BIDANG URUSAN KECAMATAN</b>									
<b>PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor</b>	<b>Kec. Nguling</b>	<b>100%</b>	<b>9.159.682.180</b>	<b>APBD II</b>		<b>100%</b>	<b>9.206.182.180</b>
<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya fasilitas penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>Kec Nguling</b>	<b>11 Data</b>	<b>59.000.000</b>				<b>63.500.000</b>
1	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Nguling	15 Laporan	30.000.000		APBD II	15 Laporan	31.500.000
					Belanja Pegawai	-			
					Belanja barang & jasa	Rp 30.000.000			
					15.000.000				
2	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Nguling	15 Dokumen	Belanja Pegawai	-	APBD II	15 Dokumen	16.500.000
					Belanja barang & jasa	Rp 15.000.000			
					Belanja modal	-			
					14.000.000				
3	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Nguling	5 Laporan	Belanja Pegawai	-	APBD II	5 Laporan	15.500.000
					Belanja barang & jasa	Rp 14.000.000			
					Belanja modal	-			
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Keuangan</b>	<b>Kec. Nguling</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>8.032.217.160</b>				<b>8.036.717.160</b>
1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Nguling	20 ASN	7.195.603.800		APBD II	20 ASN	7.197.103.800
					Belanja Pegawai	-			
					Belanja barang & jasa	Rp 7.195.603.800			
					726.726.000				
2	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Nguling	12 Dokumen	Belanja Pegawai	-	APBD II	12 Dokumen	728.226.000
					Belanja barang & jasa	Rp 726.726.000			
					Belanja modal	-			
					109.887.360				
3	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Nguling	12 Dokumen	Belanja Pegawai	-	APBD II	12 Dokumen	111.387.360
					Belanja barang & jasa	Rp 109.887.360			
					Belanja modal	-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan adm BMD</b>	<b>Kec. Nguling</b>		<b>2.427.400</b>				<b>5.427.400</b>
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec Nguling	3 Laporan	<b>1.000.000</b> Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 1.000.000 Belanja modal : -	APBD II		3 Laporan	2.500.000
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Nguling	6 Laporan	<b>1.427.400</b> Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 1.427.400 Belanja modal : -	APBD II		6 Laporan	2.927.400
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec Nguling</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>72.000.000</b>	<b>APBD II</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>78.000.000</b>
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec Nguling	3 Paket	<b>12.000.000</b> Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 12.000.000 Belanja modal : -	APBD II		3 Paket	13.500.000
	2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec Nguling	5 Dokumen	<b>5.000.000</b> Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 5.000.000 Belanja modal : -	APBD II		5 Dokumen	6.500.000
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec Nguling	36 Pegawai	<b>35.000.000</b> Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 35.000.000 Belanja modal : -	APBD II		36 Pegawai	36.500.000
	4 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Nguling	36 Pegawai	<b>20.000.000</b> Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 20.000.000 Belanja modal : -	APBD II		36 Pegawai	21.500.000
I	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administarsi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec Nguling</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>445.921.600</b>	<b>APBD II</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>457.921.600</b>
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Nguling	15 Paket	<b>15.000.000</b> Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 15.000.000 Belanja modal : -	APBD II		15 Paket	16.500.000
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Nguling	10 Paket	<b>30.000.000</b> Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 30.000.000 Belanja modal : -	APBD II		10 Paket	31.500.000
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Nguling	15 Paket	<b>10.000.000</b> Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 10.000.000 Belanja modal : -	APBD II		15 Paket	11.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec Nguling	20 Paket	20.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 20.000.000 Belanja modal : -	APBD II	20 Paket	21.500.000
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Nguling	10 Paket	35.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 35.000.000 Belanja modal : -	APBD II	10 Paket	36.500.000
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Nguling	3 Laporan	20.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 20.000.000 Belanja modal : -	APBD II	3 Laporan	21.500.000
	7	Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Nguling	5 Laporan	5.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 5.000.000 Belanja modal : -	APBD II	5 Laporan	6.500.000
	8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Nguling	4 Dokumen	310.921.600 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 310.921.600 Belanja modal : -	APBD II	4 Dokumen	312.421.600
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec Nguling</b>		<b>170.000.000</b>	<b>APBD II</b>	<b>100%</b>	<b>174.500.000</b>	
6	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec Nguling	25 Paket	70.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : - Belanja modal : Rp 70.000.000	APBD II	25 Paket	71.500.000
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec Nguling	10 Unit	85.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : - Belanja modal : Rp 85.000.000	APBD II	10 Unit	86.500.000
	3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kec Nguling	3 Unit	15.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : - Belanja modal : Rp 15.000.000	APBD II	3 Unit	16.500.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>Kec Nguling</b>	<b>100%</b>	<b>101.116.020</b>	<b>APBD II</b>	<b>100%</b>	<b>105.616.020</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Nguling	12 Laporan	63.116.020 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : Rp 63.116.020 Belanja modal : -	APBD II	12 Laporan	64.616.020	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	2	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec Nguling	12 Laporan	3.000.000		APBD II	12 Laporan	4.500.000
					Belanja Pegawai	:			
					Belanja barang & jasa	:	Rp 3.000.000		
					Belanja modal	:	-		
					Rp 35.000.000				
3	3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec Nguling	3 Laporan	-		APBD II	3 Laporan	36.500.000
					Belanja Pegawai	:			
					Belanja barang & jasa	:	Rp 35.000.000		
					Belanja modal	:	-		
					-				
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Kec Nguling</b>	<b>100%</b>	<b>277.000.000</b>		<b>APBD II</b>	<b>100%</b>	<b>284.500.000</b>
1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Nguling	20 Unit	150.000.000		APBD II	20 Unit	151.500.000
					Belanja Pegawai	:			
					Belanja barang & jasa	:	Rp 150.000.000		
					Belanja modal	:	-		
					-				
					Rp 37.000.000				
2	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Nguling	9 Unit	-		APBD II	9 Unit	38.500.000
					Belanja Pegawai	:			
					Belanja barang & jasa	:	Rp 37.000.000		
					Belanja modal	:	-		
					-				
					Rp 45.000.000				
3	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Nguling	1 Unit	-		APBD II	1 Unit	46.500.000
					Belanja Pegawai	:			
					Belanja barang & jasa	:	Rp 45.000.000		
					Belanja modal	:	-		
					-				
					Rp 5.000.000				
4	4	Pemeliharaan Mebel	Kec Nguling	3 Unit	-		APBD II	3 Unit	6.500.000
					Belanja Pegawai	:			
					Belanja barang & jasa	:	-		
					Belanja modal	:	Rp 5.000.000		
					-				
					Rp 40.000.000				
5	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Nguling	1 Unit	-		APBD II	1 Unit	41.500.000
					Belanja Pegawai	:			
					Belanja barang & jasa	:	Rp 40.000.000		
					Belanja modal	:	-		
					-				
					Rp 429.720.000				
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>Kec Nguling</b>	<b>100%</b>	<b>429.720.000</b>		<b>APBD II</b>	<b>100%</b>	<b>435.720.000</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>Kec. Nguling</b>		<b>159.720.000</b>		<b>APBD II</b>	<b>100%</b>	<b>435.720.000</b>
1	1	Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Nguling	6 Laporan	59.720.000		APBD II	6 Laporan	61.220.000
					Belanja Pegawai	:			
					Belanja barang & jasa	:	Rp 59.720.000		
					Belanja modal	:	-		
					-				
					Rp 100.000.000				
2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Nguling	4 Dokumen	-		APBD II	4 Dokumen	101.500.000
					Belanja Pegawai	:			
					Belanja barang & jasa	:	Rp 100.000.000		
					Belanja modal	:	-		
					-				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	Kec. Nguling	100%	250.000.000					
			Kec Nguling	14 Layanan	250.000.000	APBD II	14 Layanan	251.500.000		
	Belanja Pegawai	:			-					
Belanja barang & jasa	:	Rp 250.000.000								
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan			Belanja modal	:	-			
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	Kec. Nguling	100%	20.000.000					
			Kec Nguling	6 Laporan	20.000.000	APBD II	6 Laporan	21.500.000		
	Belanja Pegawai	:			-					
Belanja barang & jasa	:	Rp 20.000.000								
	Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Belanja modal	:	-			
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec Nguling	100%	265.955.000	APBD II	100%	268.955.000		
	KOORDINASI KEGLATAN PEMBERDAYAAN DESA		Kec. Nguling		265.955.000	APBD II	100%	268.955.000		
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Nguling	3 Laporan	15.955.000	APBD II	3 Laporan	17.455.000	
						Belanja Pegawai				:
Belanja barang & jasa	:	Rp 15.955.000								
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec Nguling	6 Dokumen	250.000.000	APBD II	6 Dokumen	251.500.000		
					Belanja Pegawai				:	-
					Belanja barang & jasa				:	Rp 250.000.000
					Belanja modal	:	-			
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec Nguling	100%	135.000.000	APBD II	100%	138.000.000		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kec. Nguling		135.000.000	APBD II	100%	138.000.000		
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Nguling	6 Laporan	15.000.000	APBD II	6 Laporan	16.500.000	
						Belanja Pegawai				:
Belanja barang & jasa	:	Rp 15.000.000								
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Nguling	3 Laporan	120.000.000	APBD II	3 Laporan	121.500.000		
					Belanja Pegawai				:	-
					Belanja barang & jasa				:	Rp 120.000.000
					Belanja modal	:	-			
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec Nguling	100%	60.000.000	APBD II	100%	64.500.000		
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec Nguling		60.000.000	APBD II	100%	64.500.000		
	Tersedianya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Nguling	3 Dokumen	<b>25.000.000</b>		APBD II		3 Dokumen	26.500.000	
					Belanja Pegawai	:					-
					Belanja barang & jasa	:					Rp 25.000.000
			Belanja modal	:	-						
	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Nguling	3 Dokumen	<b>15.000.000</b>		APBD II		3 Dokumen	16.500.000	
					Belanja Pegawai	:					-
					Belanja barang & jasa	:					Rp 15.000.000
	3 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan pemantauan keamanan lingkungan pelaksanaan Pilkades	Kec Nguling	4 Laporan	<b>20.000.000</b>		APBD II		4 Laporan	21.500.000	
					Belanja Pegawai	:					-
Belanja barang & jasa					:	Rp 20.000.000					
<b>TOTAL</b>					<b>10.050.357.180</b>			<b>10.113.357.180</b>			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Nguling dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Nguling.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Nguling dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF